



## Gerakan Mahasiswa di Indonesia dan Tantangannya terhadap Hegemoni Negara

Ino Anselmus Apritno Yomarda Barung

Received 27 February 2023  
Revised 22 August 2023  
Accepted 16 November 2023

### Abstrak

Dalam perannya sebagai agen perubahan lewat aktivisme gerakan sosial, mahasiswa dihadapkan dengan berbagai tantangan dan tuntutan baik internal dan struktural yang semakin kompleks. Perangkat-perangkat kekuasaan menjadi senjata represi dan melakukan pembajakan perangkat negara dalam membangun hegemoninya. Mahasiswa dibawa dalam situasi yang membuatnya terombang-ambing dengan dinamika politik yang sedang berlangsung. Situasi ini membawa fakta baru bahwa demokrasi sedang menuju dalam bentuk demokrasi elitisme dan bukan lagi menjadi demokrasi rakyat. Fokus dan tujuan penelitian ini adalah berfokus pada gerakan mahasiswa dan mengungkap tantangan yang dihadapinya dalam praktik hegemoni negara lewat instrument-instrument politiknya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan jenis studi literatur. Pendekatan kualitatif ini dilakukan untuk memahami permasalahan secara deskriptif analitik tentang situasi sosial politik dalam hal ini fenomena tentang gerakan mahasiswa yang berhadapan dengan hegemoni negara yang semakin tak terkontrol. Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana pembajakan atas perangkat-perangkat negara yang dilakukan oleh elit politik atau yang bisa disebut oligarki. Selain itu penelitian ini mengulas kembali bagaimana terminologi Anarkisme seharusnya dipahami dengan pandangan teoritis. Kemudian pelabelan ini cenderung ditempatkan pada gerakan mahasiswa dengan upaya menyandingkannya lewat data-data lapangan yang menunjukkan fakta yang sebaliknya. Dengan adanya situasi semacam ini menunjukkan berbagai tantangan yang begitu kompleks. Dengan begitu perlunya membangun wacana konsolidasi sebagai bagian dari kelompok *civil society* yang lebih luas menjadi strategi lain dalam menghadapi tantangan atas hegemoni dan dominasi rezim yang sedang terbangun.

**Kata Kunci:** Gerakan Mahasiswa; Hegemoni Negara; Anarkisme; Demokrasi.



### **Abstract**

*Students encounter a variety of complicated demands and obstacles in their capacity as change agents through social movement involvement, both on the internal and structural levels. In order to establish their hegemony, the instruments of power morph into instruments of repression and commandeer state machinery. Students are placed in circumstances that cause them to fluctuate in accordance with the continuing political dynamics. This issue highlights the reality that democracy is no longer a democracy of the people but rather is moving toward an elitist version. The focus and research objective of this is to focus on the student movement and reveal the challenges it faces in the practice of state hegemony through its political instruments. This research uses a research method with a type of literature study. This study combined a literature study strategy with a qualitative research methodology. In this example, the phenomena of the student movement dealing with state hegemony that is spiraling out of control is the socio-political context being addressed by this method of understanding the issue. The results of this research show how oligarchs, or members of the political elite, pirate the governmental apparatus. This paper additionally addresses the theoretical background in which anarchist vocabulary should be understood. Then, by contrasting it with field proof establishing the contrary truth, this labeling tends to be applied to the student movement. This type of circumstance displays many difficult problems. As a result, the necessity to establish a cohesive discourse as a component of a larger civil society group emerges as a new tactic for addressing challenges to the hegemony and dominance of the emerging regime.*

**Keywords:** *Student Movement; State Hegemony; Anarchism; Democracy.*

### **Pendahuluan**

Peran dan keberadaan mahasiswa dalam konteks kehidupan demokrasi bangsa telah terbukti menjadi bagian penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia (Slametmuljana, 1969: 100). Sebagai sebuah aktivisme pergerakan yang dijalankan oleh mahasiswa, pemupukan kapasitas baik kesadaran sosial dan kapasitas kepemimpinan terbentuk lewat aktivitas keorganisasian (Caesari et al, 2015). Selain dengan adanya wadah belajar dan penggerak bagi mahasiswa, situasi politik dan persoalan-persoalan struktural juga menjadi sumber yang merangsang pengambilan tindakan oleh mahasiswa. Situasi itu dapat berupa berbagai bentuk kekuasaan suatu rezim yang tak jarang memberikan determinasi yang dominan seperti kediktatoran Orde Lama dan rezim otoriter Orde Baru. Oleh karena itu, peran mahasiswa tentu patut diperhitungkan, mahasiswa tidak hanya sebagai penggerak dan pengawal demokrasi, lebih dari itu mahasiswa sebagai simbol perlawanan sebuah rezim yang totaliter (Uhlen 1997). Sekira-



kiranya dalam hal mewakili representasi rakyat yang menuntut keadilan atas hak yang belum cukup didistribusikan lewat berbagai skema kekuasaan.

Muridan S. Widjojo (1999) merumuskan gerakan mahasiswa dalam dua bentuk gerakan, yakni gerakan moral dan gerakan politik. Gerakan politik menempatkan diri pada pandangan bahwa perubahan politik dapat dilakukan dengan cara mengingatkan para elit politik atau bahkan mengandung kepentingan politik untuk meruntuhkan rezim politik yang berkuasa. Berbeda dengan gerakan moral, gerakan politik lebih menekankan suatu gagasan seperti mengoreksi kondisi yang banyak menimbulkan problem sosial dan berbagai kejahatan moral terhadap masyarakat. Dengan kata lain, kapasitas gerakan moral yang sebatas dengan mengingatkan atau menghimbau penguasa untuk melakukan tugasnya dengan benar. Penganut paham ini percaya bahwa suatu rezim bisa diubah dengan cara dihimbau atau diingatkan (Widjojo 1999: 240). Sejarah mencatat keberadaan kekuatan mahasiswa telah memiliki sejarah yang panjang dan menentukan berbagai situasi politik di Indonesia (Muzakar 2019). Hal ini kemudian memaksa penguasa perlu memainkan perannya lebih besar dalam melihat aktivisme gerakan mahasiswa yang semakin meluas yang ditandai dengan berdirinya organisasi kemahasiswaan dan organisasi kemasyarakatan di seluruh daerah di Indonesia, terlebih semenjak terbukanya keran demokrasi pasca reformasi.

Namun, saat ini tidak sedikit orang termasuk mantan aktivis mahasiswa seperti Alghiffari Aqsa yang berpendapat bahwa terjadi degradasi peran dan pelemahan koalisi sipil bersama gerakan mahasiswa (Kompas 31 Juli 2018) Generasi mahasiswa saat ini tentunya memiliki *zeitgeist* atau semangat zaman yang membentuk karakternya tersendiri. Kondisi ini kemudian memunculkan perbedaan pandangan dan prinsip antara generasi lama dan generasi baru. Kalangan tua meragukan kemampuan yang muda, sedangkan yang muda mencurigai yang tua. Ketidakcocokan ini tak ayal dapat menjadikan jurang pemisah antar generasi (Abdullah 1994: 4-10). Belum lagi fenomena pembajakan terhadap lembaga-lembaga negara seperti partai politik menjadikan demokrasi Indonesia berwatak sangat elitis. Fakta politik semacam ini dapat dilihat seperti pernyataan keras atas penggunaan lembaga negara semacam KPK, Kepolisian dan Kejaksaan Agung sebagai alat gebug politik (Tempo 11 Februari 2023). Selain itu, dalam catatan KontraS (22/07/2021) terdapat 10 perwira TNI yang menjabat jabatan sipil.



Dengan banyaknya tuntutan dan tantangan dalam gerakan mahasiswa di tengah hegemoni rezim membawa kita pada persoalan “momentum”. Apakah mahasiswa saat ini belum memiliki momentum yang tepat? Ataukah belum cukup cermat menentukan momentum itu sebagai batu loncatan?.

Memasuki era demokrasi yang lebih cenderung prosedural dimanfaatkan dengan baik oleh kekuasaan lewat tirai demokrasi yang lebih menguntungkan kekuasaan. Alat-alat kekuasaan yang terus mengalami peningkatan performansi sehingga semakin meyakinkan dominasi rezim atas gerakan mahasiswa. Terlebih pada era *Post Truth* pembentukan atau manipulasi opini publik oleh pragmatisme kekuasaan semakin gencar seperti yang dinarasikan Noam Chomsky dan Edward S. Herman dalam karyanya *Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media*. Selain itu, Perguruan Tinggi sebagai wadah dan sarana yang menjadi rumah berlindung bagi mahasiswa justru tercebur masuk dalam logika kekuasaan. Perguruan Tinggi justru menjadi terkomodifikasi dan terperangkap dalam agenda-agenda neoliberalisme (Fleming 2021). Masuknya yang disebut sebagai oligarki dalam panggung politik Indonesia memainkan peran kunci yang semakin menjauhkan kepentingan politik umum (Robinson dan Hadiz 2004). Cara kerja politik semacam ini dirasa semakin berhasil diterapkan, terbukti ditandai dengan situasi yang seringkali menyudutkan aktivisme gerakan mahasiswa atau berbagai bentuk pelemahan-pelemahan lainnya. Ini membawa tantangan besar bagi gerakan alternatif yang dijalankan oleh mahasiswa. Pertanyaan penting selanjutnya adalah bagaimana menghadapi *obstacle* kekuasaan yang rumit dan upaya merumuskan kembali formula gerakan yang lebih terkonsolidasi dalam basis *civil society* yang lebih luas?.

Persoalan lain adalah tentang pelabelan anarkisme yang identik dengan gerakan kepemudaan hari ini. Ini tidak terlepas dari terminologi anarkisme yang mengalami pergeseran definisi menuju definisi atau makna tunggal. Secara empiris awal mula munculnya kecaman dunia atas tindakan anarkis datang dari aksi para buruh dalam demonstrasi pada 3 Mei 1886 di Chicago (May Day) yang menewaskan banyak demonstran oleh aparat kepolisian (Marshall 1993). Pemaknaan ini selanjutnya dipakai dengan cara yang semena-mena yang diletakan pada anak muda atau suatu gerakan kepemudaan. Situasi ini membawa dampak pada keretakan relasi intim dan hubungan



yang representatif antara mahasiswa dan masyarakat. Padahal keamanan dan ketertiban sudah menjadi tugas negara lewat aparat keamanan untuk menjamin jalannya aktivitas sosial dan aksi mahasiswa dapat berjalan lancar. Oleh sebab itu, menjadi keharusan untuk kembali meninjau ulang tentang definisi anarkisme dan bagaimana negara memposisikan diri lewat jalannya kekuasaan dengan skema-skema politik tertentu.

Terdapat beberapa penelitian yang juga membahas tentang gerakan mahasiswa dan dinamika gerakan maupun aspek tantangan struktural. Penelitian tersebut diantaranya oleh Elis Mardianti (2022) dengan judul “Gerakan Mahasiswa Dalam Tiga Orde Kekuasaan”. Penelitian ini membahas mengenai arah gerakan mahasiswa dengan berbagai dinamikanya yang terjadi dalam pusran tiga orde kekuasaan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni teori gerakan sosial digunakan sebagai alat analisis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dan teknik kajian pustaka dengan sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara kepada mahasiswa yang terlibat aktif dalam gerakan mahasiswa dan data sekunder yang sumbernya diperoleh baik dari buku, artikel ilmiah, ataupun media massa. Hasil penelitian ini menunjukkan berbagai gerakan yang dilancarkan oleh mahasiswa cenderung bersifat gerakan moralis, meskipun ranah pergerakannya seringkali menuju pada ranah yang politis. Dalam aspek tantangan gerakan mahasiswa menghadapi beberapa persoalan yang datang silih berganti berdasarkan watak rezim di setiap Orde kekuasaan.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian oleh Idil Akbar (2016) berjudul “Demokrasi dan Gerakan Mahasiswa (Bagaimana Gerakan Mahasiswa Terhadap Dinamika Perubahan Sosial) Penelitian ini menunjukkan bahwa aspek perubahan sosial menuju demokratisasi di Indonesia sangat besar ditentukan oleh gerakan mahasiswa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif untuk menganalisis bagaimana gerakan sosial dan demokrasi di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan hubungan antara demokrasi dan gerakan mahasiswa yang saling berkorelasi baik gerakan mahasiswa sebagai penggerak menuju demokratisasi dan demokrasi sebagai pendorong gerakan mahasiswa agar tumbuh dan berkembang. Terlebih bahwa gerakan mahasiswa sebagai pionir perubahan sosial di Indonesia.



Berdasarkan kedua penelitian di atas, penelitian juga menempatkan gerakan mahasiswa sebagai fokus pembahas, dengan melihat aspek tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa dalam bentuk praktik kekuasaan yang hegemonik dan cenderung represif. Oleh sebab itu, penelitian ini akan mengeksplorasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa dalam konteks gerakan mahasiswa. Dengan menggunakan metode penelitian studi kepustakaan penelitian ini terlebih dahulu akan menggambarkan aspek historis gerakan mahasiswa berdasarkan beberapa periodisasi gerakan mahasiswa di Indonesia. Selanjutnya tulisan ini mencoba meninjau kembali apa itu anarkisme? Bagaimana anarkisme bergeser dengan makna yang biner? Serta pelabelannya yang ditujukan pada gerakan mahasiswa. Lebih lanjut, untuk melihat tantangan yang dihadapi oleh gerakan mahasiswa, peneliti berupaya menggambarkan bagaimana hegemoni rezim terbentuk lewat skema kekuasaan dan proses penghadangannya secara represif maupun ideologis terhadap gerakan-gerakan mahasiswa. Pada pembahasan selanjutnya tantangan konsolidasi mahasiswa dalam membangun baik alternatif atau membentuk hegemoni tandingan yang cukup kokoh sebagai bagian dari basis *civil society* yang luas akan dibahas dalam penelitian ini.

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian studi kepustakaan atau studi literatur. Jenis penelitian ini mengandalkan berbagai literatur dalam memperoleh data dan menggunakan pendekatan kualitatif karena data yang dihasilkan berupa deskripsi atau kumpulan teks (Mestika 2008). Berdasarkan topik penelitian ini, jenis penelitian ini dilakukan untuk memahami permasalahan secara deskriptif analitik tentang situasi sosial politik dan kebangsaan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2022 sampai dengan Januari 2023. Latar penelitian ini melalui konteks fenomena sosial politik yang ditelusuri lewat studi pustaka. Teknik pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan dengan cara membaca dan menelusuri literatur yang berhubungan dengan objek penelitian. Selain itu, dokumentasi juga dijadikan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan arsip, buku-buku dan teori yang relevan dengan permasalahan penelitian (Mirzaqon dan Purwoko 2017). Sumber data yang



dikumpulkan dalam penelitian ini antara lain buku-buku, jurnal ilmiah, referensi statistik, karya tesis, artikel berita, Youtube dan sumber lain yang relevan, baik yang diakses secara langsung di perpustakaan maupun secara online melalui internet. Sedangkan konsep yang digunakan untuk membantu menganalisis permasalahan berkaitan dengan topik penelitian ini yakni konsep “hegemoni” dan “Ideologi”, selain itu ditambahkan tentang konsep “anarkisme”. Konsep ini digunakan karena cukup relevan untuk dikaitkan dengan konteks dalam penelitian.

Selanjutnya berdasarkan sumber data yang dikumpulkan kemudian diperiksa kebermaknaannya dan relevansinya dengan topik penelitian. Menurut Mirshad (2014) teknik analisis data dalam penelitian kepustakaan adalah analisis data model Miles dan Huberman. *Pertama*, analisis saat pengumpulan data. Hal ini dilakukan dengan menangkap esensi dari fokus penelitian berdasarkan sumber data yang telah dikumpulkan melalui tahap demi tahap, yakni sumber data yang dikumpulkan dikaitkan beberapa sub pembahasan yang diangkat berkaitan dengan sejarah gerakan mahasiswa, konsep anarkisme, oligarki, alat atau instrumen politik, demokrasi Indonesia, dan *civil society*. *Kedua*, data yang telah terkumpulkan kemudian dihubungkan satu sama lain. Tahap analisis ini antara lain melalui reduksi data, *display data*, dan gambaran konklusi. Proses ini dilakukan secara berulang-ulang, dengan data yang terus dikumpulkan atau diganti dengan data yang lebih relevan agar dapat memperkuat hasil penelitian.

## **Kerangka Teori**

### **Anarkisme**

Anarkisme adalah teori politik yang bertujuan untuk menciptakan penduduk tanpa hirarkis (baik dalam politik, ekonomi, maupun sosial). Para Anarkis berusaha mempertahankan bahwa anarki, ketiadaan aturan-aturan, adalah sebuah format yang bisa diterapkan dalam sistem sosial dan bisa menciptakan kebebasan individu dan kebersamaan sosial. Anarkis melihat bahwa tujuan kesudahan dari kebebasan dan kebersamaan sbg sebuah kerjasama yang saling membangun selang satu dengan yang lainnya. Para anarkis (penganut anarkisme) berpendapat bahwa negara, pemerintah, atau otoritas lain yang dalam anggapan umum diperlukan untuk menciptakan suatu



order (keteraturan) di dalam tatanan sosial dengan menggunakan perangkat-perangkat represifnya (militer, undang-undang, polisi) justru merupakan sumber dari segala disorder (ketidakteraturan). Karena kekuasaan, yang menciptakan hierarki, justru cenderung melogiskan kekerasan untuk memelihara kekuasaannya. Dari gambaran singkat mengenai anarkisme di atas, kita patut mempertanyakan ulang definisi umum anarkisme yang identik dengan hal negatif. Dalam perkembangan anarkisme yang paling serius dapat ditelusuri dari tokoh anarkisme besar seperti Pierre-Joseph Proudhon dan Mikhail Bakunin. Kedua pemikir anarkisme ini dapat membantu menjelaskan ulang definisi dan makna anarkisme dan kaitannya dengan fenomena kekerasan.

### **Hegemoni**

Hegemoni sesungguhnya adalah kritik terhadap konsep pemikiran yang mereduksi dan menganggap esensi suatu entitas tertentu sebagai satu-satunya kebenaran mutlak, utamanya reduksionisme dan esensialisme yang melekat pada pemikiran-pemikiran penganut Marxisme dan Non Marxisme. Titik awal konsep Gramsci tentang hegemoni adalah bahwa suatu kelas dan anggotanya menjalankan kekuasaan terhadap kelas-kelas di bawahnya dengan cara kekerasan dan persuasi. Hegemoni bukan hubungan dominasi dengan menggunakan kekuasaan, tetapi hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis. Dengan demikian, hegemoni dalam pengertian Gramsci adalah sebuah organisasi konsensus dimana ketertundukan diperoleh melalui penguasaan ideologi dari kelas yang menghegemoni.

Hegemoni total integral, ditandai dengan afiliasi massa yang mendekati total. Masyarakat menunjukkan tingkat kesatuan moral dan intelektual yang kokoh, yang tampak dari hubungan organis pemerintah dan yang diperintah. Hubungan tersebut tidak diwarnai kontradiksi dan antagonism baik secara sosial maupun etis. Hegemoni yang merosot (decadent), ditandai dengan adanya potensi disintegrasi atau potensi konflik yang tersembunyi di bawah permukaan, artinya meskipun sistem yang ada telah mencapai kebutuhan dan sasarannya, tetapi mentalitas massa tidak sungguh-sungguh selaras dengan pemikiran yang dominan dan subyek hegemoni. Hegemoni minimum, adalah hegemoni yang bersandar pada kesatuan ideologis antara elit ekonomi, politik dan intelektual, yang berlangsung bersamaan dengan keengganan terhadap setiap campur



tangan massa dalam hidup bernegara. Kelompok-kelompok hegemonis tidak mau menyesuaikan kepentingan dan aspirasinya dengan kelas lain dalam masyarakat. Gramsci, dalam membicarakan hegemoni memberikan tiga batasan konseptualisasi, yaitu ekonomi, masyarakat politik (political society) dan masyarakat sipil (civil society).

### **Interpelasi Ideologi dan Aparatus Negara**

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori mengenai Interpelasi ideologi dan aparatus negara. Louis Althusser adalah pelopor kajian ideologi. Ideologi menurut Althusser bukanlah “kesadaran palsu” yang cenderung berbeda dalam pandangan Marx. Althusser menganggap ideologi adalah sesuatu yang sudah tertanam dalam diri individu sepanjang hidupnya dan merupakan produk sejarah yang menjelma menjadi sesuatu yang ilmiah. Ideology juga merepresentasikan hubungan imajiner individu dengan kondisi keadaan. Aparatus negara yang berfungsi cenderung didominasi ideologi, tetapi dapat difungsikan secara sekunder sebagai alat represi secara langsung maupun tidak langsung (Althusser 1971: 138). Althusser membaginya dalam dua bentuk apparatus yakni *Ideological State Apparatus* (ISA) dan *Repressive State Apparatus* (RSA). Dalam membagi dua kategorisasi tersebut Aparatus Ideologi Negara dibagi dalam berbagai bentuk instrumen negara seperti institusi pendidikan, keluarga, lembaga hukum, partai politik, media, dan lain-lain. Sementara Aparatus Represi Negara seperti tentara, polisis pengadilan, penjara dan berbagai bentuk aparatus represi yang mengandung kekerasan baik fisik maupun non-fisik (Althusser 2015:24). Teori ini digunakan untuk menggambarkan cara kerja negara lewat instrument kekuasaan negara. Bagaimana hegemoni negara dan peran oligarki memainkan skema kekuasaan dalam mendisiplinkan subjek politik dalam menghadang wacana tandingan lewat gerakan-gerakan mahasiswa.

### **Hasil dan Diskusi**

#### **Sejarah Aktivisme Gerakan Mahasiswa di Indonesia**

Dalam perkembangannya dari masa ke masa gerakan mahasiswa atau pemuda merupakan kekuatan moral dan politik untuk menekan kekuatan kolonial dan rezim



otoriter yang korup, serta merenggut hak-hak individu (Sanit 1999: 219). Secara historis sumber kekuatan pemuda banyak terbentuk selain karena semangat nasionalisme yang tumbuh, didukung pula dengan munculnya kelompok-kelompok intelektual bangsa. Situasi itu dimulai dari keterdesakan yang dialami oleh Belanda juga dari munculnya gerakan beraliran agama dan sosialisme sekuler yang mendorong Belanda membangun kebijakan politik etis. Kebijakan itu kemudian melahirkan banyak kaum-kaum terpelajar dalam negeri. Kemunculan kaum terpelajar ini pun mendorong terbentuknya berbagai organisasi-organisasi sosial dengan corak ideologi yang radikal, seperti Sarikat Priyayi tahun 1906 dan Boedi Oetomo. Walaupun kedua organisasi tersebut masih mengalami kendala karena hanya mencakup kalangan bangsawan semata (Pramusinto dan Purbakusumo 2016).

Keberadaan organisasi ini berlanjut dengan terbentuknya Syarikat Dagang Islam (SDI) yang lebih mencakup berbagai dimensi kelas, agama, Jawa dan non-Jawa. SDI kemudian berubah nama menjadi Syarikat Islam (SI) pada tahun 1919. Mereka mengklaim memiliki anggota sebanyak 2000.000 orang, yang menjadikan Syarikat Islam sebagai organisasi pemuda terbesar saat itu (Lane 2014: 44). SI yang lebih bersifat heterogen membangun aliansi yang meliputi kalangan modernis dan tradisional, sehingga semakin memperkuat basis gerakan perjuangan melawan kebijakan kolonial. Infiltrasi ideologi berpaham komunis juga membangun fondasi ideologis yang semakin kokoh. Semakin kuatnya Syarikat Islam membuat koloni beranggapan bahwa keberadaan SI dapat mengancam dengan potensi-potensi yang mereka miliki (McVey 2010: 16). Pada tahun 1914 muncul pula ISDV yang membangun kerja sama dengan SI untuk memperkuat basis gerakan dalam perjuangan anti feodal dan anti kolonial. Pada masa itu, banyak anggota SI yang beranggota ganda seperti Semaroen, Darsono, Alimin, dan Tan Malaka yang merupakan tokoh dari kedua organisasi tersebut (Kasenda 2014: 143-144).

Organisasi ini mulai nampak bercorak gerakan politik progresif. Beberapa orang dari kedua organisasi ini kemudian merubah ISDV menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI). Anggota SI yang merupakan anggota Partai Komunis kemudian dikeluarkan dari PKI lewat kongres pada bulan Oktober 1921 sebagai upaya pendisiplinan partai. Dengan munculnya organisasi yang banyak dimotori oleh mahasiswa-mahasiswa pribumi



memaksa Belanda mengurangi jumlah beasiswa ke luar negeri. Sebagai gantinya, mereka membentuk beberapa sekolah, seperti sekolah kedokteran di Surabaya, Institut Teknologi Bandung, dan sekolah hukum di Batavia (Ingleson 2015). Peningkatan pajak pun dilakukan karena kebijakan politik etis pemerintah Belanda dianggap semakin memberatkan dan semakin meningkatkan penderitaan rakyat. Hal-hal tersebutlah yang memicu meningkatnya radikalisme gerakan mahasiswa.

Peran mahasiswa berlanjut di era pasca kemerdekaan. Walaupun tidak terlalu berperan signifikan di era ini, tidak sedikit kalangan-kalangan terpelajar yang mengambil peran besar dalam mencapai kemerdekaan. Pada periode demokrasi parlementer tahun 1950-an dan demokrasi terpimpin Indonesia mulai membangun perguruan tinggi, ditandai dengan banyaknya gelombang pelajar yang mulai menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi. Namun, banyak pengamat yang beranggapan bahwa tahun-tahun tersebut disebut sebagai periode ketenangan politik dan memunculkan generasi muda yang berciri hedonistik, elitis, dan apolitis (Aspinall 2012: 159). Sayangnya, gelombang pelajar atau mahasiswa ini masih banyak didominasi oleh masyarakat kelas atas yang lebih mendapatkan akses yang mudah, ketimpangan ini seakan melupakan peran pemuda lintas kelas maupun dimensi baik dari kalangan modernis dan tradisional yang mencakup berbagai kalangan pemuda nasionalis dalam perjuangan mencapai kemerdekaan. Pada masa pasca kemerdekaan ini juga mahasiswa yang dianggap sebagai calon potensial mulai banyak dilirik oleh berbagai partai politik dalam membangun kapasitas partai dan menarik atensi konstituen, sehingga menghadirkan dimensi politik yang kental (Pramusinto dan Purbokusumo 2016).

Dimensi politik yang kuat menciptakan politik aliran dalam tubuh organisasi gerakan mahasiswa, relasi politik yang bermunculan seperti adanya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) 1947 yang berafiliasi dengan Partai Islam Modernis yaitu Masyumi, kemudian Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) 1954 berafiliasi dengan Partai Nasional Indonesia, Konsentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI) 1956 dan Gerakan Mahasiswa Sosialis (Gemsos) 1955 yang memiliki kedekatan intim dengan PKI dan PSI (Maxwell 1997). Kedekatan Organisasi pergerakan mahasiswa dengan partai-partai politik tak jarang merangsek mahasiswa masuk dalam kepentingan-kepentingan elit politik partai. Meski demikian, gerakan mahasiswa yang berhaluan kiri



ini berhasil memobilisasi kaum proletariat dan petani, terkhususnya pengaruh besar peran partai berhaluan kiri radikal yakni PKI. Gerakan aliran kiri dalam tubuh organisasi mahasiswa jelas semakin memperuncing politik “aliran” dalam kontestasi politik di tingkat electoral (Lane 2014: 56). Kelompok kepentingan didikan Belanda, seperti para perwira militer KNIL, tuan-tuan tanah, borjuis, yang buta perjuangan emansipatif dan kelompok *enclave* yang lain merasa terancam dengan semakin masifnya pengaruh gerakan kiri. Kelompok ini perlahan dibuat tersingkir hingga berbuntut pada pemberontakan (PRRI/Permesta) lalu menepi bersama kekuatan TNI AD (Pramusinto dan Purbokusumo 2016).

Gerakan mahasiswa yang membentuk aliran kiri dan tentunya PKI ini perlahan mengalami tekanan terlebih dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965. Kampanye penghabisan gerakan kiri yang didalangi oleh PKI dan kelompok Soekarnoisme mulai dilakukan. Peran gerakan mahasiswa yang beraliran anti komunis cukup sentral dengan akhirnya sepakat membentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) di rumah Menteri Pendidikan Tinggi, Brigjen Syarif Thayep. Komposisi KAMI terdiri dari organisasi keagamaan yang meliputi HMI, PMKRI, GMKI, PMII. Sedangkan organisasi Non keagamaan meliputi Sekretariat Bersama Mahasiswa Lokal (SOMAL), Gerakan Mahasiswa Sosialis (Gemsos), Pelopor Mahasiswa Sosialis Indonesia (PELMASI), dan Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI) (Pramusinto dan Purbokusumo 2016). Berbagai aksi demonstrasi yang dilakukan KAMI bersama militer (TNI AD) dengan mengampanyekan tuntutan Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat). Hal ini memicu Soekarno dan kelompok gerakan kiri terdesak (Lane, 2014: Asspinall 2012). Puncaknya gerakan ini berhasil menjatuhkan Soekarno dari takhta kepemimpinannya dan berhasil melakukan aksi yang berujung pada pemberangusan kelompok PKI atau pun pihak yang berafiliasi bersama gerakan kiri PKI. Peristiwa dan peran besar mahasiswa di tahun ini dijuluki sebagai “Angkatan 66”, Diantaranya yang cukup terkenal saat itu seperti Soe Hok Gie dan Arief Budiman.

Perjuangan itu terus berlanjut memasuki periode Orde Baru. Gerakan ini sempat mengalami fase hening di mana mahasiswa yang kembali ke kampus untuk belajar dan menempuh ilmu sebanyak mungkin. Arif Budiman (1970) menyebutnya sebagai “Gerakan Koreksi” yaitu gerakan yang tidak harus mengumpulkan massa yang besar



namun membekali dirinya dengan ideologi alternatif. Aspinnal (2012) menyebut periode ini sebagai menguatnya “gerakan moral” dan meredupnya “gerakan kiri”. Hal ini dapat terjadi akibat tindakan represif Orde Baru yang kemudian memaksa mahasiswa bersikap halus. Ali moertopo menyebut periode ini sebagai floating mass (massa mengambang), ditambah dalam bidang politik dengan dwifungsi ABRI semakin diperkuat. Oleh sebab itu ABRI dapat bertindak sebagai stabilisator, dinamisator, dan penjaga kebijakan Orde Baru (Semma 2008: 110). Namun, demonstrasi dan protes mulai bermunculan dalam tahun-tahun berikutnya terkait permasalahan tentang merajalelanya korupsi, anggaran terhadap pendidikan, dan munculnya ketimpangan kelas di berbagai sektor sosial. Walaupun reaksi tersebut masih terbatas pada gerakan moral.

Tindakan represif terhadap aktivisme mahasiswa yang berjalan panjang pada periode Orde Baru ini mulai mencapai klimaksnya saat krisis moneter melanda Asia Tenggara, termasuk Indonesia pada tahun 1997. Indonesia mengalami krisis ekonomi yang luar biasa sehingga menciptakan kepanikan publik secara masif. Mata uang yang anjlok berdampak pada kenaikan harga barang yang juga diikuti dengan pengangguran yang semakin meningkat. Situasi ini disusul lagi dengan krisis pangan di sejumlah wilayah di Indonesia. Krisis ekonomi dan politik yang melanda bangsa segera direspon mahasiswa (Kasenda 2015). Peristiwa ini dianggap sebagai momentum yang tepat untuk meruntuhkan kekuasaan otoriter Orde Baru. Pengorganisasian gerakan mulai bermunculan dalam merespon kondisi ini. Berbagai organisasi baik organisasi lama dan baru bermunculan seperti BEM, KM, dan Senat-Senat Fakultas. Selain itu, terdapat sebuah gerakan politik kaum muda saat itu yang dinamakan Aliansi Demokrasi Rakyat atau ALDERA. Pergerakan ALDERA yang dijalankan oleh beberapa mahasiswa saat itu seperti Pius Lusrilanang dan rekan-rekannya membangun skema gerakan yang bersifat sporadis menuju aksi yang lebih politis atau bersifat semi partai (Wibisana, et al 2022).

### **Meninjau Ulang Anarkisme pada Gerakan Mahasiswa**

Anarkisme sering diartikan sebagai aksi kekerasan, kekacauan, kericuhan dengan berbagai macam pengertian negatif lainnya. Konsep ini sering disalahartikan dengan lebih dimaknai sebagai sebuah konsep yang bernuansa destruktif, bahkan kerap kali



diposisikan berseberangan dengan demokrasi. (Daniel Hutagalung, dalam pengantar buku *Anarkisme: Perjalanan Sebuah Gerakan Perlawanan 2003*). Agar memahami dengan tepat tentang anarkisme, perlu upaya peninjauan lebih jauh agar dapat mencapai pada pemahaman yang tidak keliru atau tidak melulu dipahami sebagai pengertian negatif secara berlebihan. Anarkisme sendiri adalah sebuah paham yang percaya bahwa individu sebagai bagian dari masyarakat, akan memberikan sumbangan atau kontribusi terbesarnya bagi masyarakat jika tidak ada intervensi yang berlebihan oleh suatu otoritas atau kekuasaan di atasnya. Para penganut anarkisme terkenal seperti Pierre-Joseph Proudhon, Mikhail Bakunin, Peter Kropotkin, Max Stirner, dan Leo Tolstoy. Mereka berpandangan bahwa negara, pemerintah, atau otoritas tertentu yang dalam pandangan umum memiliki tugas menciptakan keadilan atau keteraturan sosial dengan alat-alat atau instrumen kekuasaannya (media, hukum, partai politik, polisi) justru menjadi sumber dari segala ketidakteraturan dalam kehidupan berdemokrasi (Sheehan 2003). Sederhananya, anarkisme sendiri adalah paham yang menentang kekerasan itu sendiri sebagaimana pelabelan negatif ini dialamatkan padanya.

Orang pertama yang dengan rela menyebut dirinya seorang anarkis adalah penulis politik Perancis dan perintis sosialis Pierre-Joseph Proudhon. Dalam bukunya "What is Property" Proudhon (1876) berargumen bahwa hukum masyarakat yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan otoritas melainkan lebih berasal dari sifat masyarakat itu sendiri, dan ia meramalkan pembubaran otoritas pada akhirnya dan munculnya tatanan sosial alami: Sebagaimana manusia mencari keadilan dalam kesetaraan, demikian pula masyarakat mencari keteraturan dalam anarki. Anarki ketiadaan penguasa begitulah bentuk pemerintahan yang kita dekati setiap hari.

Perbedaan penting kedua antara Bakunin dan Proudhon terletak pada konsep metode revolusioner mereka. Proudhon percaya adalah mungkin untuk menciptakan dalam masyarakat yang ada asosiasi mutualis yang dapat menggantikannya, karena itu dia menentang kekerasan aksi revolusioner. Bakunin (1873) menyatakan bahwa "nafsu untuk menghancurkan juga merupakan dorongan kreatif," menolak untuk menerima pendekatan sedikit demi sedikit; revolusi kekerasan, menyapu semua institusi yang ada, dalam pandangannya merupakan awal yang diperlukan untuk pembangunan masyarakat yang bebas dan damai. Untuk mengembalikan kenetralan berpikir untuk



mempertanyakan ulang “apa itu anarkisme?”. Proudhon dan Bakunin menekankan apa sebenarnya yang dimaksud dengan anarkisme dan bagaimana perubahan itu bergeser menuju tindakan tandingan yang berwatakan kekerasan. Namun, penilaian lain perlu dipertimbangkan dalam melihat pelabelan semacam itu dapat dialamatkan pada subjek tertentu lewat skema kekuasaan negara.

Narasi menarik lain digambarkan dalam buku ABC Anarkisme, yakni Alexander Berkam dimana dia menjelaskan definisi anarkisme secara menarik dalam narasinya tentang periode revolusi dan pergerakan ideologi besar (Sosialis).

*“Anarkisme memiliki banyak musuh, mereka tidak akan mengatakan hal yang benar mengenainya. Sekarang ini saya dapat mengatakan kepada anda bahwa baik bos politik anda ataupun majikan anda, para kapitalis ataupun para polisi, tidak akan berbicara dengan jujur kepada anda mengenai anarkisme. Kebanyakan dari mereka tidak mengetahui mengenai hal itu, dan semua membencinya. Surat kabar dan terbitan mereka pers-pers kapitalis juga menentang anarkisme”* (Alexander Berkham 2017: 2).

Selain melihat anarkisme sebagai sebuah konsep filsafat dan politik, pemaknaan yang berubah terhadap anarkisme juga dapat lewat beberapa peristiwa sejarah revolusi dan gerakan baik di tingkat internasional maupun di Indonesia. Peter Marshall (1993) dalam tulisannya *Demanding The Impossible, A History of Anarchism* menjelaskan insiden di Chicago pada 3 Juli 1886 silam sebagai awal mula terciptanya prasangka buruk orang Amerika terhadap berbagai bentuk anarkisme. Para buruh yang membawa tuntutan dalam aksi demonstrasi tersebut dihadang oleh aparat kepolisian menggunakan senjata api. Polisi menembaki kerumunan tersebut di luar pabrik McCormick Reaper, begitupun selanjutnya demonstrasi yang berlanjut di lapangan Haymarket yang memicu insiden penembakan oleh polisi terhadap kerumunan demonstran akibat sebuah lemparan bom.

Di Indonesia sendiri pelabelan anarkis, pemberontak, pembuat gaduh, nakal begitu kuat dilekatkan pada anak muda atau mahasiswa yang nampak dipraktikan pada era Orde Baru. Hal ini dapat terjadi dengan meredupnya gerakan politik, atas beberapa peristiwa politik yang berkaitan dengan organisasi kemahasiswaan yang berafiliasi dengan gerakan kiri, puncaknya pada peristiwa G30/SPKI. Pemuda yang diidentikan sebagai penggerak utama revolusi seakan dimaknai oleh rezim Orde Baru untuk menciptakan sebuah sistem kekuasaan yang lebih solid. Dengan begitu layar tradisi revolusi ditutup sebagai usaha depolitisasi atas pengendalian terhadap pemuda dan



mahasiswa agar tidak melakukan revolusi (Yudhistira 2010). Sebagai sebuah pemimpin bangsa, Soeharto memperingatkan mereka yang melakukan demonstrasi dengan tidak segan-segan memakai kekuatan militer untuk melarang dan membubarkan demonstrasi maupun kelompok penggerak (Samson 1973: 128).

Peninjauan ulang semacam ini juga perlu dibawah dalam beberapa data yang jarang diperbincangkan dan dibahas oleh publik, terkhusus dalam berbagai peristiwa demonstrasi. Amnesty Internasional bekerja sama dengan *Crisis Evidence Lab* dan *Digital Verification Corps*, telah memverifikasi 51 video yang menggambarkan 43 insiden kekerasan terpisah oleh polisi Indonesia selama aksi yang terjadi antara 6 Oktober hingga 10 November 2020 lalu. Pemantauan yang telah dilakukan oleh Amnesty International Indonesia mendokumentasikan setidaknya 402 korban kekerasan polisi di 15 provinsi selama aksi tersebut. Tercatat sebanyak 6.658 orang ditangkap di 21 provinsi. Berdasarkan laporan dari tim advokasi gabungan, sebanyak 301 dari mereka ditahan dengan jangka waktu yang berbeda-beda, termasuk 18 jurnalis, yang kini telah dibebaskan. Ketika demonstrasi yang mayoritas diisi oleh mahasiswa di banyak kota, sebagian dari mereka direspon dengan tindakan kekerasan oleh aparat keamanan, seperti tindakan pemukulan, penyiksaan, dan perlakuan buruk lainnya, yang menunjukkan pelecehan hak atas kebebasan berkumpul dan berekspresi.

Pertimbangan lain juga perlu disodorkan melihat dinamika yang terjadi pada situasi demonstrasi di lapangan dan hubungannya dengan pengaruh kekuasaan. Selain itu, dalam sebuah interview dalam sebuah Podcast "Abraham Samad SPEAK UP", Hariz Azhar menyebut aparat keamanan saat ini lebih cenderung diibaratkan sebagai tameng untuk menutup pagar ekspresi mahasiswa yang dianggap dapat melakukan aksi liar. Hal ini bisa dianggap keliru mengingat polisi seharusnya lebih menjalankan fungsinya sebagai penjamin ekspresi sosial mahasiswa dapat berjalan baik dan tepat sasaran. Perilaku petugas keamanan seringkali memakai perangkat-perangkat kekerasannya untuk mengusir aksi massa mahasiswa ketimbang melakukan dialog penting agar demonstrasi lebih berjalan kondusif, walaupun pada praktiknya juga beberapa aksi mahasiswa diwadahi dengan baik oleh petugas keamanan. Gerakan moral ini pun sering kali berbenturan dengan petugas keamanan, ketimbang mencapai pada substansi dan tujuan awal dalam pengkonsolidasian aksi mahasiswa. Boleh dikatakan, gerakan



mahasiswa sekarang sedang menemui persoalan lain yang belum cukup ditelusuri lebih jauh dalam melihat diskursus kekuasaan yang dibangun lewat tirai demokrasi atau era globalisasi yang berciri neoliberalisme.

### **Oligarki dan Perangkat-Perangkat Represi**

Ancaman sistem atau struktur dominan semacam yang dibahas di atas bisa disebut sebagai oligarki. Jeffrey A. Winters (2011) dalam bukunya yang berjudul *Oligarchy* menempatkan oligarki dalam dua dimensi. Dimensi (1) oligarki dibangun dengan kekuatan atau modal kapital yang tidak terbatas. (2) Oligarki menggurita secara sistemik yang beroperasi dalam kerangka kekuasaan. (3) Dimensi ini sukses mencengkeram kekuasaannya bahkan dalam arena demokrasi sekalipun. Oligarki yang bersifat lebih cair cenderung bisa hidup dalam banyak jenis sistem pemerintah, termasuk demokrasi. Menurut Winters, gurita kekuasaan oligarki di Indonesia dimulai dari masa pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Menariknya, walaupun masa orde baru telah usai, sistem kekuasaan itu tidak hilang sepenuhnya dan mencair dengan sistem yang bersifat desentralistik (Robinson dan Hadiz 2004). Kekuasaan oligarki justru semakin menemukan sistem yang memberikan ruang yang lebih besar dalam membentuk sistem kekuasaan yang dominan dengan tirai demokrasi. Oligarki dalam arena demokrasi saat ini jauh lebih sulit untuk dideteksi, bahkan untuk sekalipun menghambat ekspansi kekuasaannya dalam segala lini. Hal ini berbeda dengan era sebelumnya yang lebih cenderung sentralistik atau terpusat pada keluarga cendana, yakni Soeharto dan kroni-kroninya.

Perangkat-perangkat kekuasaan menjadi senjata represi, bagaimana demokrasi dibajak oleh kekuasaan oligarki. Pembajakan ini dilakukan melalui manifestasi perangkat atau instrumen kekuasaan negara, misalnya peran polisi dan militer yang semakin dominan dalam beberapa sektor, produk Undang-Undang yang semakin jauh dari kepentingan publik (UU Cipta Kerja dan UU Omnibus Law), media yang dikuasai oleh oligarki, partai politik yang semakin pragmatis. Situasi ini tentunya dimanfaatkan untuk kepentingan yang elitis dan eksklusif. Akibatnya, kedaulatan rakyat akan terlihat samar-samar dan hanya akan tampak pada momen tertentu seperti kontestasi elektoral semata.



Ini semakin menandakan bahwa demokrasi yang berjalan sudah jauh dari cita-cita yang sifatnya substansial dan hanya menjadi sekadar prosedural semata (Firman 2019). Sebut saja UU Cipta kerja atau UU Omnibus Law, Papua yang semakin ditumpuki oleh tentara, media yang lebih dekat dengan kekuasaan, partai politik yang semakin jauh fungsinya sebagai representasi masyarakat, dan Perguruan tinggi yang semakin terkomodifikasi adalah akibat dari sistem politik tidak berhasil menciptakan kesejahteraan dan semakin redupnya oposisi baik di tingkat nasional maupun di tingkat akar rumput. Dalam catatannya, Jeffrey Winters dalam kajiannya tentang oligarki mencatat kurang dari 0,0000002% dari total penduduk menguasai 10% GDP di Indonesia (Jeffrey Winters 2013:1).

Menjamurnya oligarki dalam percaturan politik bangsa dengan sendirinya membangun watak otoritarian yang cenderung represif terhadap kebebasan sipil terkhususnya terhadap gerakan mahasiswa. Misalnya saja peristiwa kelam mahasiswa yang diculik di masa Orde Baru, peristiwa mahasiswa Universitas Pattimura yang diculik lalu disiksa, atau ratusan mahasiswa yang menjadi korban kekerasan aparat keamanan saat demonstrasi UU *Omnibus Law* tahun 2020 lalu. Banyak ahli yang beranggapan bahwa rezim yang sekarang sebagai rezim *security* ala Orde Baru (IndoProgress 8 Oktober 2019). Pernyataan semacam ini tentunya bersinggungan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Dalam sebuah riset oleh lembaga *The Habibie Center* dengan judul "Fenomena Kemunduran Demokrasi Indonesia" mencatat dalam masa pemerintahan Jokowi peran militer dan polisi dianggap semakin menguat. Polisi bahkan memiliki posisi yang istimewa secara kelembagaan, ditambah lagi beberapa aktor kepolisian yang mendapatkan posisi penting pada jabatan-jabatan publik. Begitu pun dalam laporan KontraS (22/07/2021) terdapat 10 perwira TNI yang menjabat jabatan sipil, jabatan itu meliputi komisaris BUMN hingga staf khusus menteri. Hal ini tentu dapat menimbulkan politisasi di tingkat POLRI dan TNI dengan kekuasaan yang terlalu dominan. *Power* yang hampir tidak bisa terbendung ini semakin mudah bagi kekuasaan dalam mengatasi serangan oposisi semacam inisiasi gerakan-gerakan bawah tanah.

Semenjak era pasca reformasi, wajah pendidikan tinggi mengalami banyak transformasi. Dalam satu sisi, universitas mengalami banyak perkembangan dalam aspek birokratisasi kampus dan wadah belajar yang kian beragam. Selain itu, fasilitas



pendidikan dan sumber pengetahuan yang ditawarkan cukup menjamin mahasiswa sekarang mendapatkan modal pengetahuan untuk perkembangan intelektualitas bagi dirinya. Masalahnya adalah universitas mengalami perubahan dalam menempatkan posisinya yang cenderung masuk dalam pragmatisme lingkaran kekuasaan. Dalam buku yang ditulis Peter Fleming (2021) berjudul *How University Die* menggambarkan bahwa neoliberalisasi pendidikan membuat wajah pendidikan tinggi semakin bergantung dengan mekanisme pasar, sehingga membuatnya terjerumus lebih lanjut pada komodifikasi pendidikan dan pengabdian diri kepada korporasi. Institusi pendidikan menjadi perpanjangan kontrol negara dalam diskursus pengetahuan dan kekuasaan. Polemik ini berbuntut pada pembatasan gerak kampus sebagai produksi gagasan-gagasan kritis dan justru menjadi alat pemberangusan gagasan kritis tersebut.

Melihat situasi ini, mahasiswa dihipnotis dengan situasi yang tidak lagi kondusif dalam mencari ruang yang cukup bagi penyaluran ekspresinya. Tak jarang mahasiswa lebih memilih menempuh jalur lain sebagai cara alternatif dalam menyalurkan suara. Tidak sedikit organisasi kampus diilegalkan dan dibatasi menjalankan aktivitasnya di wilayah universitas. Hal itu tercatat dalam draft Permendikbud ristek seperti dalam pasal 7 ayat (10), pasal 7 ayat (3) dan pasal 5 yang dianggap mengganggu kebebasan serta kemandirian organisasi kemahasiswaan (CNN Indonesia 11 Januari 2018). Kontrol struktural semacam ini menandakan perlawanan terhadap resistensi pada kalangan pemuda dengan bentuknya yang sama seperti kepemimpinan masa lalu yang represif, tapi dikemas dengan regulasi yang lebih bersifat legitim dalam logika birokratis agar mudah diterima oleh publik atau bahkan mahasiswa itu sendiri.

Secara teoritis melihat fenomena rezim yang semakin hegemonik, Antonio Gramsci melihat hegemoni berangkat dari pemahaman suatu kelas sosial sebagai kelas dominan yang menjalankan kekuasaan terhadap kelas-kelas di bawahnya dengan pendekatan kekerasan. Hegemoni menggunakan hubungan persetujuan dengan kepemimpinan politik dan ideologi. Pengertian hegemoni ini cenderung berbeda dengan pengertian hegemoni tentang penguasaan suatu bangsa terhadap bangsa lainnya. Namun, Gramsci lebih menekankan adanya organisasi konsensus yang diperoleh melalui penguasaan ideologi dari kelas yang menghegemoni kelas-kelas di bawahnya. Gramsci membagi konsep hegemoni dalam tiga konseptualisasi, yakni ekonomi, negara, dan



masyarakat sipil. Semua konsep itu merujuk pada identifikasi hubungan antara formasi sosial yang membentuk garis konseptualisasi hegemoni. (Patria dan Arief 1999). Gramsci menjelaskan bahwa dalam upaya hegemoni kekuasaan cenderung melakukan mekanisme konsensus dengan logika institusi birokrat yang bersifat universalitas, ketimbang dengan melakukan penindasan secara langsung.

Pandangan lain tentang hegemoni negara dapat ditelusuri dalam beberapa karyanya Althusser. Althusser mengatakan terdapat dua dimensi hakikat negara, yakni Ideological State Apparatus (ISA) dan Repressive State Apparatus (RSA). Aparatus represi negara memiliki arti bahwa negara melakukan fungsinya dengan tindakan kekerasan, misalnya Polisi, tentara, pengadilan, penjara, pemerintah. Namun, upaya represi tidak selamanya berkaitan dengan tindakan pendisiplinan secara fisik seperti represi administratif. Sedangkan, aparatus ideologi negara ketika negara melakukan fungsinya dalam menciptakan legitimasi yang mengabsahkan berbagai tindakan represi negara terhadap masyarakat. ISA cenderung menggunakan mekanisme manipulasi kesadaran masyarakat secara intelektual, kultural, dan simbolik, contohnya seperti gereja, partai, serikat buruh, sekolah, keluarga, media, dan budaya (Althusser 2015:24). Dengan kedua dimensi perangkat kekuasaan semacam ini negara dapat menciptakan hegemoni yang dapat mengatur keteraturan sosial atau dengan cara yang lebih radikal menggunakan kedua instrumen ini untuk memangkas berbagai macam resistensi kelas bawah yang dianggap mengganggu jalannya pengaruh hegemoni negara.

### **Regresi Politik dan Masa Depan Demokrasi**

Persoalan kesehatan demokrasi bangsa terus menjadi perbincangan. Beberapa peristiwa yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2022 menunjukkan sebuah keniscayaan tentang kesehatan demokrasi yang semakin memburuk atas beberapa tindakan dan keputusan politik. Sebut saja produk hukum yang cukup kontroversial beberapa tahun terakhir seperti UU Omnibus Law, UU Cipta kerja dan UU RKUHP. Keputusan tersebut banyak memicu respon dari publik. Banyak yang menganggap UU tersebut sangat berbahaya bagi keutuhan demokrasi bangsa.

**Gambar 1.** Daftar Gambar Reaksi Massa Demonstran (Buruh dan Mahasiswa) Dalam Aksi Penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja.

 <p><b>DARUL AMRI</b></p> <p>Aksi unjuk rasa mahasiswa di Makassar menolak Omnibus Law Cipta Kerja dengan memblokir jalan dan membakar ban bekas, Selasa (06/10)</p>	 <p><b>ADITYA PRADANA PUTRA/ANTARA FOTO</b></p> <p>Sejumlah demonstran membawa spanduk dalam aksi jalan kaki menuju Istana Merdeka di Jalan Salemba, Jakarta, Selasa (20/10).</p>
 <p><b>DEDI HERMAWAN</b></p> <p>Sejumlah buruh berkumpul di depan perusahaan tempat mereka bekerja di Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Selasa (6/10) usai demo tolak pengesahan UU Omnibus Law</p>	 <p><b>BAY ISMOYO/AFP</b></p> <p>BEM SI menuntut agar pemerintah membatalkan Omnibus Law dan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti UU alias perpu.</p>
 <p><b>DOKUMEN FSP KEP SERANG</b></p> <p>Sejumlah buruh di Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Selasa (06/10) juga menggelar unjuk rasa menentang UU Omnibus Law.</p>	 <p><b>BAY ISMOYO/AFP</b></p> <p>Unjuk rasa mahasiswa menolak UU Cipta Kerja di dekat Monas, Jakarta, Selasa (20/10) siang diwarnai aksi membakar ban.</p>



FAKHRI HERMANSYAH/ANTARA FOTO

Sejumlah buruh melakukan aksi mogok kerja di kawasan MM 2100, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (6/10/2020).



DARUL AMRI

Di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, puluhan mahasiswa dari berbagai organisasi melakukan demo menolak disahkan RUU Cipta Kerja.



MUHAMMAD ADIMAJA/ANTARA FOTO

Sejumlah buruh yang tergabung dalam Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia disingkat KP-KPBI melakukan aksi tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja di kawasan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (06/10).



BAY ISMOYO/AFP

"Kami tetap menyampaikan #MosiTidakPercaya kepada pemerintah dan wakil rakyat yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat," kata Koordinator Pusat Aliansi BEM SI, Remy Hastian, melalui keterangan tertulis, Senin (19/10).



ANTARA FOTO/ASEP FATHULRAHMAN

Ratusan mahasiswa dan buruh yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bersatu berunjuk rasa menolak pengesahan Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja, di Alun-alun Serang, Banten, Selasa (6/10/2020)



BAY ISMOYO/AFP

Lebih dari seribu orang yang terdiri dari kelompok mahasiswa dan buruh menggelar unjuk rasa dan pawai di Jakarta, Selasa (20/10), menolak Undang-Undang Cipta Kerja.



RAISAN AL FARISI/ANTARA FOTO

Ratusan buruh memblokir jalan nasional Bandung-Garut--Tasikmalaya saat melakukan aksi di Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (06/10).



DEDI HERMAWAN

Sejumlah buruh berkumpul di depan perusahaan tempat mereka bekerja di Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Selasa (6/10) usai demo tolak pengesahan UU Omnibus Law



DARUL AMRI

Aksi mahasiswa di Makassar menolak Omnibus Law Cipta Kerja, Selasa (06/10)

Sumber: Diolah dari data hasil liputan BBC News Indonesia.

Selain keputusan politik yang cenderung tidak berpihak kepada masyarakat umum. Terdapat UU lain yang berhubungan bahkan mengancam kedudukan mahasiswa/pemuda sebagai motor penggerak dan basis *civil society* secara umum. Hal ini diantaranya tertera pada Pasal 218 ayat 1 tentang penghinaan terhadap Presiden, Pasal 192 dan 193 tentang makar, Pasal 349 tentang penghinaan lembaga negara, Pasal 256 tentang pidana demo tanpa pemberitahuan, Pasal 188 ayat 1 tentang penyebaran ajaran komunis dan berbagai pasal kontroversial lainnya. Selain itu, ada wacana yang mengharuskan mahasiswa untuk mengikuti proses wajib militer yang dianggap banyak pihak sebagai cara lain dalam menekan resistensi peran mahasiswa sejauh ini, walaupun wacana dibantah oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim (detiknews 21 Agustus 2020). Berbagai upaya negara tersebut mendapat kritikan karena dianggap dapat mencederai demokrasi bangsa yang sudah berjalan sejauh ini. Pelemahan



*civil society* dirasa menjadi salah satu pusat kemunduran kehidupan demokrasi secara mondial. Alih-alih mendapatkan sebuah terobosan yang dapat menguatkan demokrasi, potensi regresi malah cenderung menguat.

Negara tampak kelabakan seakan tidak ada lagi isu strategis yang dapat mendorong demokrasi substansial. Sebagai upaya menguatkan kembali legitimasinya, negara menempuh cara melemahkan sendi-sendi aktivisme yang bertendensi menguatkan posisi rezim atau justru sebaliknya bakal mengancam kedudukannya kedepan. Selain itu, dalam beberapa poin catatan oleh LBH Jakarta (23/10/2023) UU tersebut dianggap dapat dijadikan upaya lain dalam melindungi lembaga negara dan berpotensi menjadi pasal-pasal karet yang membungkam kebebasan berekspresi. Seseorang bisa saja dikenakan delik aduan dikarenakan melakukan tindakan yang dianggap merongrong kewibawaan pemerintah. Tentu saja hal ini sangat multi interpretatif dan berpotensi disalahgunakan untuk memberangus siapa saja yang dianggap mencoba melawan pemerintah. Situasi demikian dapat saja menyasar posisi mahasiswa dalam keterlibatannya sebagai agen penggerak perubahan. Mahasiswa seakan mau ditempatkan pada posisi yang tidak menyenangkan dan perlahan berpotensi mengalami stagnasi dari dalam. Mengingat sejauh ini selain gerakan berbasis identitas seperti moment pada aksi damai 212, peran mahasiswa dalam membangun gerakan sosial sangat diperhitungkan.

Dalam beberapa data yang dapat dikumpulkan menunjukkan telah terjadi turunnya kualitas demokrasi dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan laporan *The Economist Intelligence* (EIU) bergerak stagnan dengan skor Indeks Demokrasi Indonesia sebesar 6,71 poin. Demokrasi Indonesia harus turun ke peringkat 54 dan dikategorisasikan dengan level demokrasi cacat. Pengurangan tersebut tidak hanya menyentuh aspek kebebasan berekspresi dan partisipasi masyarakat, tetapi juga diikuti dengan fungsi pemerintahan. Selain itu, untuk mengukur regresi demokrasi dan politik yang mengancam masa depan demokrasi di Indonesia, terdapat laporan yang menunjukkan angka yang cukup tinggi tentang tingginya kasus korupsi. Dalam laporan *Transparency International Indonesia* (TII) Indeks Persepsi Korupsi tahun 2022 di Indonesia berada pada skor 34. Hal ini menunjukkan terjadi penurunan hingga 4 poin berdasarkan IPK tahun sebelumnya. Indikator *Political Risk Service* (PRS) yang meliputi korupsi dalam



sistem politik, konflik kepentingan elit, suap izin ekspor impor. Dari data data tersebut juga menunjukkan korupsi politik yang terus meningkat seperti suap dan gratifikasi (Kompas 31 Januari 2023).

Regresi demokrasi dan semakin jauhnya cita-cita demokrasi substansial membawa fakta baru bahwa demokrasi sedang menuju dalam bentuk demokrasi elitisme. Mencuatnya wacana itu datang dari berbagai upaya kekuasaan yang perlahan memainkan skema politik yang ujung-ujungnya adalah untuk kepentingan elit di tingkat elektoral atau lingkaran kekuasaan semata (Firman 2019). Meminimalkan partisipasi politik rakyat sama seperti mengembalikannya pada rezim-rezim diktator sebelumnya. Situasi ini tentu paradoksal, mengingat konstitusi seharusnya semakin memperkuat kedaulatan rakyat dalam maknanya yang seluas-luasnya. Cara pandang elit semacam ini sangat berbahaya. Fakta bahwa masyarakat yang buta dalam aktivitas politik adalah penyebab kurangnya pencerahan para pemimpin atau kelompok elit. Artinya, tujuan seharusnya dalam memberikan pengetahuan dan partisipasi yang luas bagi masyarakat sipil adalah tanggung jawab elit (Rusadi 2004). Ini justru dapat menjadi keuntungan tersendiri bagi elit yang berkuasa. Wacana yang dimainkan selalu mengacu pada pelemahan politik rakyat. Partai politik yang menjadi satu-satunya jembatan dalam mewadahi politik rakyat, malah dibajak oleh segelontor elit dengan bantuan dana atau hambatan regulasi semacam kebijakan kontroversial seperti *parliamentary threshold* dan *presidential threshold*.

### **Tantangan Konsolidasi Mahasiswa dan *Civil Society***

Demokrasi kita saat ini boleh dikatakan memberikan banyak kesempatan bagi masyarakat, salah satunya adalah kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat. Ini menjadi hadiah yang penting dalam memanfaatkan kesempatan yang dilahirkan oleh sistem demokrasi dalam mengaktualisasikannya lebih dari sekedar suara-suara asing. Keuntungan ini tentu berbeda dengan periode Orde Baru di bawah kekuasaan Soeharto. Konsep *civil society* sangat sering dibicarakan oleh berbagai kalangan baik aktivis, akademisi, dan intelektual, pembicaraan tentang konsep ini memiliki kesimpulan yang serupa tentang bagaimana membentuknya menjadi kekuatan sosial dan juga politik



sebagai “senjata pengimbang” terhadap determinasi otoritarianisme Orde Baru (Subono 2003). Konsep ini lebih jauh dijembatani atau diaktualisasi oleh pemuda dalam hal ini mahasiswa dan berbagai kelompok pemuda lainnya. Keuntungan dengan hadirnya sistem yang lebih leluasa justru banyak menciptakan kebisingan yang tidak cukup atau sekedar membangun solidaritas yang kokoh.

Penilaian semacam ini bukanlah upaya menjustifikasi sebuah klaim progresifitas dan pencapaian gerakan mahasiswa dalam memainkan perannya saat ini. Pemetaan berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi perlu dilakukan untuk melihat lebih jauh perubahan dinamika internal maupun struktural yang bisa dijadikan penilaian yang lebih sepadan dan menjadi bahan evaluasi yang cukup terhadap pertimbangan mahasiswa. Agar tidak terjebak dengan romantisme masa lalu, kesadaran tentang situasi yang dihadapi sekarang adalah usulan awal untuk menuju pada reformasi yang berkelanjutan. Persoalan awal ini saja tidak terlepas dari suatu tantangan dalam arena sosial atau yang lebih luas disebut Habermas dengan *public sphere* atau ruang publik (Santoso 2007). Transformasi sosial yang sedang dipacu dihadapkan dengan sebuah tantangan serius soal fragmentasi ruang publik, atau dapat diartikan kehidupan bangsa yang semakin dicengkram oleh kekuatan kapitalisme lanjut. Sebagaimana dijelaskan oleh *review Legitimation Crisis*, Habermas memandang repolitisasi ruang publik sebagai sesuatu kecenderungan yang penuh krisis dalam masyarakat kapitalis kontemporer (McCarty 2006.). Pemuda secara politis menjadi bagian relevan dalam situasi ini bukan hanya sebagai suatu kelas sosial tapi suatu fase kritis dalam proses sosialisasi sistem untuk membentuk atau memproduksi pola-pola motivasional dan orientasi nilai yang bersifat apatis. Walaupun Habermas yakin akan terjadi krisis legitimasi pada masyarakat kapitalis lanjut, namun situasi itu belum terbukti. Pemuda atau mahasiswa dihadapkan dengan persoalan dalam tatanan masyarakat modern yang menghadirkan perilaku sosial yang lebih individualistik.

Pada sisi lain, konsolidasi elit semakin terlihat solid. Hal ini ditandai dengan keluarnya beberapa UU seperti Perppu Ormas yang berpotensi besar membatasi kebebasan sipil bahkan memberangus posisi masyarakat sipil (Priyono et al 2012). Hadirnya kekuasaan oligarki atau plutokrasi dengan membajak perangkat-perangkat kekuasaan termasuk tantangan struktural yang lebih besar dan nyata dalam proyeksi



gerakan sosial secara keseluruhan. Ini persis seperti era Orde Baru atau Orde Lama yang memiliki kekuasaan serupa yang sama berpengaruhnya. Kehidupan politik dibayangi oleh elit politik yang berkolaborasi dengan pemilik modal dalam menentukan arahan para *political advisors* mendesain kehidupan politik bangsa (Crouch 2004). Dengan carut-marut kehidupan demokrasi yang tidak menentu, seharusnya menjadi alasan dasar gerakan pemuda atau mahasiswa mulai melakukan misi panjang yang tidak serta-merta berhenti pada aksi unjuk rasa. Misi historis dan penggandengan beberapa peran lainnya menuju pematangan masyarakat sipil perlu diagendakan lebih dalam.

Permasalahan lain datang dengan pengajuan pertanyaan: Apakah masyarakat madani selalu *compatible* dengan perjuangan demokrasi dan tegaknya *citizenship*? Atau seberapa solid *civil society* saat ini? Pertanyaan ini seakan menantang tentang seberapa kuatkah hegemoni yang terbangun selama ini dalam membangun *counter discourse* terhadap hegemoni penguasa. Hal ini mengartikan ada persoalan internal yang belum cukup terselesaikan. Masih banyak bagian dari masyarakat sipil yang masih terjebak dengan kepentingan pragmatisme. Begitu pun yang dihadapi dalam internal gerakan mahasiswa yang tidak lagi murni dalam menentukan ideologi gerakan. Konsolidasi dalam ruang demokrasi belum terealisasi atau mengakar secara kuat karena rentan tergiur oleh kepentingan dominan. Melihat pembicaraan tentang *civil society* dan peran mahasiswa di dalamnya sejauh ini tentu justru semakin banyak persoalan yang harus dijawab. Sebagaimana dinyatakan oleh Vedi R. Hadiz (2001) bahwa kita tidak terlalu memahami elemen dan kepentingan yang saling kontradiktif dalam *civil society*. Persoalan ini mengartikan jika banyak pembenahan yang harus diciptakan untuk mencapai demokratisasi bangsa.

Menjawab ini perlu ada titik awal untuk memulainya, dimulai dari yang paling muda dan paling banyak. Mahasiswa perlu dipercayakan dalam hal ini. (1) Perlu memperkuat konektivitas jaringan dan solidaritas bagi seluruh mahasiswa. Hal ini perlu dilakukan mengingat penentuan suatu gerakan dapat dinilai dari seberapa intim konsolidasi itu terbangun. (2) Mahasiswa perlu menyadari orientasi lawan yang sedang dihadapi dan persoalan komprehensif yang saat menjadi hadangan besar dalam terhambatnya demokratisasi bangsa. Artinya kemampuan intelektualitas menjadi hal dasar yang kemudian dapat menentukan arah pergerakan dan terhindar dari manipulasi



kepentingan elit. (3) Membangun sinergi bersama *civil society*. Dalam membangun konsolidasi yang erat, sebagai pemuda peran mereka perlu memerlukan rekan seperjuangan yang beragam. Fakta ini dirasa cukup rasional mengingat konsolidasi *civil society* yang belum mengalami progresivitas yang baik dalam membangun politik alternatif yang sepadan. (4) Kepercayaan masyarakat. Poin ini sangat penting, melihat tingkat kepercayaan terhadap mahasiswa masih terbilang minim. Mahasiswa membutuhkan *standing position* yang harus disepakati secara kolektif. Dengan kata lain, mahasiswa tidak dapat dipisahkan oleh rakyat itu sendiri.

## Kesimpulan

Bagaimana pun juga gerakan sosial yang tumbuh akan selalu beriringan dengan kondisi negara di bawah rezim yang semakin ofensif dan berbahaya. Harus diingat pula bahwa gerakan-gerakan sosial dan ruang berekspresi adalah jalan menuju demokratisasi bangsa. Gerakan-gerakan itu adalah bagian dari cara pemuda atau mahasiswa menunjukkan semangat dan kepeduliannya bagi polemik bangsa hari ini. Walaupun perlu disadari di era seperti sekarang ini, berekspresi dan melakukan aktivasi perjuangan, semata-mata tidak harus turun ke jalan dengan alat pengeras suara di tangan atau mengibarkan bendera - bendera organisasi. Kesadaran ini menjadi penting agar pemuda dapat menerjemahkan ulang skema dan orientasi gerakan yang lebih efisien ke depannya. Sebagai generasi masa depan bangsa, mahasiswa perlu mendapatkan mandat dan kepercayaan lebih tinggi. Maka dari itu, peran mereka tidak boleh dikesampingkan atau dibiarkan begitu saja tanpa arahan dan kepercayaan rakyat. Dengan begitu, keterwakilan rakyat bisa berjalan dengan rasa aman lewat iringan aksi-aksi generasi muda yang cerdas politik.

Dalam keterlibatannya secara lebih luas, gerakan mahasiswa perlu melampaui solidaritas di tingkat pemuda. Artinya, pembenahan gerakan berbasis *civil society* perlu diperbincangkan lebih matang terkhusus peran seluruh kategori kelompok *civil society*. Dalam pandangan Olle Tornquist (2002), kita perlu memiliki dua hal sekaligus dalam perjuangan demokrasi dalam kaitannya dengan gerakan *civil society*. Pertama, perlunya mempertajam dan memperluas *aktivisme civil society* dalam rangka mewujudkan



demokrasi yang lebih bermakna. Kedua, keharusan melakukan revitalisasi peran, posisi dan pengaruh *civil society* untuk mempromosikan demokrasi substansial. Perlu keterhubungan dengan aktivitas politik di tingkat akar rumput menuju struktur yang lebih makro, serta menjamin gerakan pro demokrasi bermanfaat bagi perubahan politik dan perlahan terlepas dari intervensi sepihak oligarki dan relasinya dengan elit-elit politik. Politik rakyat menjadi bagian penting pilar demokrasi, sehingga agenda tersebut selalu menjadi topik penting menuju demokratisasi bangsa.

## Daftar Pustaka

- Althusser, Louis. 2015. *Ideologi dan Aparatus Ideologi Negara (Catatan-Catatan Investigasi)*. Jakarta. IndoProgress.
- Aspinall, Edward. 2012. *Indonesia: moral force politics and the struggle against authoritarianism*, in Weis, Meredith L & Aspinall, Edward (ed). *Student Activism in Asia: Between Protest and Powerlessness*. London: University of Minnesota Press. pp. 153-180.
- Bakunin, Mikhail. 2017. *Statism & Anarchy*. Yogyakarta : Second Hope.
- BBC News Indonesia. "Demo 20 Oktober, mahasiswa dan buruh kembali 'tolak Omnibus Law', Mahfud MD minta aparat 'jangan bawa peluru tajam". Diambil 15 Agustus 2023. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54611952>
- BBC News Indonesia. Omnibus Law Cipta Kerja picu unjuk rasa yang diwarnai tembakan meriam air dan gas air mata, Menaker: 'Ayo kita dialog'. Diakses pada tanggal 15 Agustus 2022. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54431015>
- Berkham, Alexander, 2017. *ABC Anarkisme*. Jakarta. Daun Malam.
- Budiman, Arief. 1983. *Peranan Mahasiswa Sebagai Intelegensia*, in Aswab & Narsir, Ismed (ed). Cendekiawan dan Politik. Jakarta LP3ES.
- Caesari, Y., & Listiara, A. (2015). "Kuliah versus Organisasi" Studi Kasus Mengenai Strategi Belajar pada Mahasiswa yang Aktif dalam Organisasi Mahasiswa Pecinta Alam Universitas Diponegoro. *Jurnal Psikologi*, 12(2). 164-175.
- CNN Indonesia. 2018. "Peraturan Soal Organisasi Mahasiswa, Benarkah Mengungkung?. Diakses pada tanggal 19 Agustus 2023: <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20180103103421-445-266293/peraturan-soal-organisasi-mahasiswa-benarkah-mengungkung>.
- DataIndonesia.id. 2023. EIU: Indeks Demokrasi Indonesia Sebesar 6,71 Poin pada 2022. <https://dataindonesia.id/varia/detail/eiu-indeks-demokrasi-indonesia-sebesar-671-poin-pada-2022>



- Eppler, Erhard. 2009. *Melindungi Negara dari Ancaman Neoliberal*. Jakarta. Friedrich-Elbert Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia.
- Fleming, Peter. 2021. *Dark Academia How Universities Die*. United States: Pluto Press
- Hadiz, Vedi R. 2001. *Civil Society, Globalisation and Labour: Workers in Post-Soeharto Indonesia, dalam Bjorn Beckman et all, Civil Society and Authoritarianism in Third World*. Stockholm University.
- Han Revenda Putra, Marshanda Farah Noviana, dan Naufal Ridhwan Aly. 2022. "Pejuang Demokratik Butuh Massa Terorganisasi". Diambil pada 15 Februari 2023. (<https://www.balairungpress.com/2022/07/edward-aspinall-perjuangan-demokratik-butuh-massa-terorganisir/>).
- Herman, Edward S. Chomsky, Noam. 2010. *Manufacturing Consent: Mass and The Media*. London: Pantheon Books
- Hikam, Muhammad AS. 1999. *Demokrasi dan Civil Society*, cetakan 2. Jakarta: LP3ES.
- International, Amnesty. 2020. Usut Bukti-bukti Kekerasan Polisi Sepanjang Demo Tolak Omnibus Law. Diambil pada 15 Februari 2023. (<https://www.amnesty.id/usut-bukti-bukti-kekerasan-polisi-sepanjang-demo-tolak-omnibus-law/>)
- Kasenda, Peter. 2014. *Hari-Hari Terakhir Orde Baru*. Jakarta : Komunitas Bambu.
- Kasenda, Peter. 2014. *Sukarno, Marxisme dan Leninisme: Akar Pemikiran Kiri dan Revolusi Indonesia*. Jakarta : Komunitas Bambu.
- Kompas.id. 2023. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot Tajam. Diakses pada tanggal 17 Agustus 2023. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/01/31/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-merosot-tajam>.
- Kompas. 2023. Pola Manipulasi Opini Publik di Media Sosial. Diakses pada tanggal 18 Agustus 2023. <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/04/24/pola-manipulasi-opini-publik-di-media-sosial>.
- KontraS. 2021. Penunjukan Perwira TNI sebagai Komisaris BUMN, Melecehkan Agenda Reformasi Sektor Keamanan. Diakses pada tanggal 17 Agustus 2023. <https://kontras.org/2021/07/22/penunjukan-perwira-tni-sebagai-komisaris-bumn-melecehkan-agenda-reformasi-sektor-keamanan/>
- Lane, M. 2012. *Malapetaka Di Indonesia; Sebuah Esei Renungan Tentang Pengalaman Sejarah Gerakan Kiri*. Jakarta: Djaman Batoe.
- LBH Jakarta. 2021. Dua Tahun Pemerintahan: Rapor Merah Rezim Jokowi- Ma'ruf Amin. <https://bantuanhukum.or.id/dua-tahun-pemerintahan-rapor-merah-rezim-jokowi-maruf-amin/>.
- Marshall, Peter. 2010. *Demanding The Impossible, A History of Anarchism*. PM Press
- Maxwell, John. 2001. *Soe Hok-Gie: Pergulatan intelektual muda melawan tirani*, terj. Tri Wibowo Budi Santoso, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.



- McCarty, Thomas. 2006. *Teori Kritis Jurgen Habermas*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- McVey, Ruth T. 2010. *Kemunculan Komunisme Indonesia*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Mestika, Zed. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Mirzaqon, T,A dan Purwoko, Budi. 2017. *Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Expressive Writing*. Jurnal BK: Unesa.
- Muzakar, Abdullah. 2019. *Gerakan Mahasiswa Dalam Perspektif Karl Marx*. Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
- Nezar, Patria & Arief, Andie. 1999. *Antonio Gramsci; Negara dan Hegemoni*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Noor, Firman. 2019. *Demokrasi dan Oligarki*. Jakarta. Bibliosmia Karya Indonesia.
- Pramusinto, Agus & Purbokusumo, Yuyun. 2016. *Indonesia Bergerak 2 : Mozaik Kebijakan Publik di Indonesia*. Yogyakarta. IGPA Universitas Gadjah Mada & Pustaka Pelajar.
- Priyono, B. Herry, dkk. 2012. *Kratos Minus Demos: Demokrasi Indonesia, Catatan dari Bawah*. Jakarta. Yayasan Pustaka Obor.
- Raharjo, J, Wasisto. 2021. *Fenomena Kemunduran Demokrasi Indonesia 2021*. Jakarta: The Habibie Center.
- Raillon, Francois. 1985. *Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia: Pembentukan dan Konsolidasi Orde Baru 1966-1974*: Jakarta. LP3ES.
- Robinson, Richard & Vedi R. Hadiz. 2004. *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in a Age of Markets*. London & New York: Roulledge Curzon.
- Rusadi. (2006). *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Samson, Allan A., "Indonesia 1973: a climate of concern", *Asian Survey*, Vol. XIV, No. 2 (Februari), 1974.
- Sanit, Abri. 1999. *Pergolakan Melawan Kekuasaan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Semma, Mansyur. 2008. *Negara dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia dan Perilaku Politik*. Jakarta: Yayasan Obor
- Slametmuljana, Prof. Dr. 1969. *Nasionalisme Sebagai Modal Perjuangan Bangsa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Soe Hok Gie. 1961. *Catatan Seorang Demonstran*. Jakarta: LP3ES.
- Subono, Nur Iman. 2003. *Civil Society, Patriarki, dan Hegemoni*. Jurnal CIVIC Vol. 1 No. 2 Agustus.
- Suharsih & Kusuma, Ignatius Mahendra. 2007. *Bergerak Bersama Rakyat: Sejarah Gerakan Mahasiswa dan Perubahan Sosial di Indonesia*. Yogyakarta. Resist Book.
- Tempo.co. 2023. Duga KPK Dijadikan Alat Gebuk Politik, IM 57+ Desak Jokowi Bentuk Tim Investigasi. Diakses pada tanggal 18 Agustus 2023.



<https://nasional.tempo.co/amp/1690220/duga-kpk-dijadikan-alat-gebuk-politik-im-57-desak-jokowi-bentuk-tim-investigasi>

Tempo.co. Indeks Demokrasi Indonesia. <https://data.tempo.co/data/1624/indeks-demokrasi-indonesia-2022-stagnan>

Tilly, Charles. 1978. *From Mobilization to Revolution*. Addison-Wesley: ReadingMass  
Tornquist, Olle. 2002. *Popular Development and Democracy*. UNSRID.

Uhlin, Andreas. 1997. *Oposisi Berserak: Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia*. Bandung: Penerbit Mizan Anggota IKAPI

Usman, Sunyoto. 1999. *Arah Gerakan Mahasiswa : Gerakan Politik Ataukah Gerakan Moral?*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 2 November 1999.

Wibisana, Teddy, dkk. 2022. *ALDERA: Potret Gerakan Politik Kaum Muda 1993 – 1999*. Jakarta. PT Kompas Media Nusantara.

Widjojo, Muridin S. 1999. *Penakluk Rezim Orde Baru, Gerakan Mahasiswa '98*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

Winters, A. Jeffery, 2011. *Oligarcy*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.